

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari tahun ke tahun pertumbuhan pembangunan Indonesia semakin melesat. Pertumbuhan pembangunan tentu sejalan dengan semakin bertumbuhnya pula perekonomian di Indonesia. Hal ini akan berdampak dari semakin tingginya daya saing dimasyarakat. Perekonomian yang semakin melesat membuat beberapa daerah berusaha untuk dapat berjalan selaras dengan pertumbuhan yang ada di Indonesia.

Kabupaten Boyolali sebelum tahun 2010 sempat mengalami tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Tingginya tingkat pengangguran di Boyolali terjadi karena tingkat pendidikan yang belum memadai, sempitnya lapangan pekerjaan, masih tingginya ego masyarakat Boyolali untuk pilih-pilih kerja sesuai dengan apa yang mereka mau kerjakan. Hal inilah yang membuat kabupaten Boyolali semakin tertinggal dibanding dengan kota lainnya.

Pada tahun 2010 dibawah kepemimpinan Drs. Seno Samodro yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Boyolali meluncurkan sebuah kebijakan baru yaitu Boyolali Pro Investasi. Sampai saat ini kebijakan Boyolali Pro Investasi telah berjalan selama 5 tahun dengan beberapa perubahan signifikan yang dapat di rasakan masyarakat Boyolali. Beberapa perubahan tersebut berupa turunnya angka pengangguran yang terdapat di Boyolali dengan data sebagai berikut yang diinput melalui Suara Merdeka pada

tanggal 28 Januari 2015 menghimpun data di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) Boyolali, pengangguran di Kabupaten Boyolali terus menurun sejak diciptakannya kebijakan Boyolali Pro Investasi. Pada tahun 2011 usia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat sebanyak 462.374 orang, dan pengangguran terbuka sebanyak 25.562 orang. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Boyolali usia 15 tahun ke atas yang bekerja meningkat menjadi 497.984 orang dan jumlah pengangguran menurun ke angka 23.550. Jumlah penduduk yang bekerja pada usia 15 tahun ke atas di tahun 2013 naik lagi menjadi 500.041 orang dan jumlah pengangguran berkurang lagi menjadi 28.852 orang. Pada 2014 lalu, jumlah yang bekerja pada usia 15 tahun ke atas menjadi sebanyak 693.473 orang, dan jumlah pengangguran turun menjadi sekitar 23.000 orang. Di lansir oleh Suara Merdeka pula pada *tanggal 28 Januari 2015*, total investasi yang masuk ke Kabupaten Boyolali hingga akhir tahun 2014 telah mencapai lebih dari 4,551 triliun.

Di lihat dari kata “Boyolali Pro Investasi” tentu sudah dapat dimengerti bahwa Boyolali saat ini membuka peluang besar bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Boyolali. Untuk menarik investor masuk ke Boyolali tentu tak hanya slogan Boyolali Pro Investasi saja yang ingin diberikan Pemkab Boyolali namun juga beberapa fasilitas yang ditawarkan Pemkab Boyolali kepada para investor. Tercatat dengan iming-iming tersebut kebijakan Boyolali Pro Investasi menorehkan keberhasilan untuk dapat mengubah serta membuat Boyolali beserta masyarakatnya mengalami peningkatan perekonomian.

Berikut ini merupakan PERKEMBANGAN INVESTASI PMDN KABUPATEN BOYOLALI dari tahun 2010-2015 sejak dicetuskan Kebijakan Boyolali Pro Investasi :

TAHUN	INVESTOR PER TAHUN	INVESTOR KOMULATIF	INVESTOR PER TAHUN
2010	767	1,856	153,452,340,100
2011	859	2,715	250,265,940,608
2012	1,056	3,771	273,254,000,000
2013	938	4,709	1,121,680,000,000
2014	804	5,513	1,170,394,000,000
2015 s/d Triwulan III	721	6,234	1,054,196,000,000

Tabel. 1.1PERKEMBANGAN INVESTASI PMDN KABUPATEN BOYOLALI

Pencapaian tersebut tak lepas dari peran serta Pemkab Boyolali yang melakukan pengawasan mengenai perekonomian di Kabupaten Boyolali dalam menanggapi berbagai permasalahan yang mengakar di Boyolali.

Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Boyolali tentu saja akan berdampak pada semakin berkurangnya tingkat pengangguran di Boyolali dan sejalan dengan semakin berkurangnya angka

pengangguran di Boyolali maka akan semakin berkurangnya pula angka kemiskinan yang ada di Boyolali.

Melalui kebijakan Boyolali Pro Investasi ini pula diharapkan masyarakat Boyolali tak perlu lagi pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan di Boyolali saat ini diharapkan masyarakat Boyolali dapat bekerja didaerahnya sendiri tanpa susah-payah mencari pekerjaan dikota-kota lain yang dengan begitu akan menggerakkan perekonomian didaerahnya sendiri.

Dalam upaya mencapai keberhasilan melalui kebijakan Boyolali Pro Investasi, Pemkab Boyolali terus melakukan kajian-kajian mengenai beberapa aturan yang dapat menarik investor masuk dan menanamkan modalnya di Boyolali. Misalnya saja Pemkab Boyolali kini memberikan kemudahan pada investor dengan membebasaknya sebagian besar persyaratan menanam modal di Boyolali. Dari 46 perizinan yang ada di Boyolali kini hanya ada 2 persyaratan saja yang dimintai retribusi oleh Pemkab Boyolali yaitu IMB (izin Mendirikan bangunan) dan HO (gangguan lingkungan). Tak hanya itu saja, baru-baru ini Pemkab Boyolali memberikan kemudahan lainnya untuk para investor dengan membuka perizinan tanam modal melalui *online*. Dengan sistem *online* ini diharapkan akan lebih lagi mempermudah para investor yang berada jauh dari Boyolali untuk menanam modal di Boyolali.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 menyebutkan tentang Penanam Modal (UUPM) yaitu berupa Penanam Modal atau Investor adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun

penanam modal luar negeri untuk melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia.

Kebijakan Boyolali Pro Investasi disambut baik oleh berbagai pihak misalnya dari masyarakat dan juga dari para investor. Kini masyarakat Boyolali bisa menjadi lebih produktif lagi dengan pekerjaan baru yang mereka lakukan. Dengan bekerja itulah maka akan dapat menggerakkan perekonomian keluarga mereka sendiri pada khususnya. Sedangkan untuk para investor menyambut baik kebijakan Boyolali Pro Investasi ini karena tak hanya kemudahan administrasi yang mereka dapatkan, namun juga untuk mengembangkan sayapnya mereka melihat bahwa UMK (upah minimum kota) di Boyolali masih cukup rendah dibandingkan kota-kota lainnya sekitar Rp. 1,4 juta saja.

Dilihat dari sisi keuntungannya memang kebijakan Boyolali Pro Investasi ini memberikan dampak positif yang signifikan yang dapat dirasakan berbagai pihak. Dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Boyolali kebijakan Boyolali Pro Investasi yang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun ini dianggap cukup berhasil. Bahkan setelah pemilihan Bupati tanggal 9 Desember 2015 yang dimenangkan kembali oleh Drs. Seno Samodro dan M. Said Hidayat, SH kebijakan Boyolali Pro Investasi ini terus dilanjutkan dengan harapan yang sama.

Kebijakan Boyolali Pro Investasi ini tak hanya menjadi slogan untuk menarik masuknya para investor di Boyolali saja namun juga telah menjadi visi-misi Kabupaten Boyolali sejak dicetuskannya kebijakan Boyolali Pro Investasi ini.

Boyolali Pro Investasi yang berarti Boyolali ramah dengan investasi ini membutuhkan berbagai campur tangan berbagai pihak didalamnya. Salah satu yang mendorong jalannya kebijakan Boyolali Pro Investasi dapat diterima oleh masyarakat luas adalah dengan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh Humas dan Protokol Kepemerintahan Kabupaten Boyolali yang memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat luas mengenai kebijakan Boyolali Pro Investasi ini.

Dalam berdirinya sebuah lembaga baik perusahaan maupun pemerintahan diharapkan dapat menyediakan seorang praktisi Humas atau PR (*public relation*) sebagai antisipasi adanya tanggapan *negative* dari masyarakat terkait dengan berdirinya suatu organisasi perusahaan maupun instansi pemerintah ditengah-tengah lingkungan mereka. Masyarakat seakan menjadi faktor penting yang harus dipikirkan oleh lembaga-lembaga tersebut karena seberapapun kuatnya dasar sebuah keputusan kalau masyarakat menolak maka lembaga tersebut harus memikirkan ulang mengenai hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam Komarudin (2014:26) yang mengutip dari Faisal Tamin (2004) mengatakan beberapa peran SDM Humas Pemerintah yang salah satunya adalah, seorang praktisi Humas haruslah dapat mempengaruhi opini publik dan mengupayakan arah informasi publik dapat memberikan pendapat umum agar terjadi kesamaan visi dan misi, kebijakan, strategi, maksud, tujuan, sasaran, dan program serta persepsi, masyarakat dan pemerintah, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat hidup berdampingan.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti untuk dapat melihat bagaimana strategi yang dilakukan Humas Kabupaten Boyolali dalam mendorong jalannya Kebijakan Boyolali Pro Investasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menarik masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana Strategi Humas Kabupaten Boyolali Dalam Mendorong Kebijakan Boyolali Pro Investasi ?”.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penulis dapat menentukan tujuan penelitian adalah “Untuk Mengetahui Strategi Humas Kabupaten Boyolali Dalam Mendorong Kebijakan Boyolali Pro Investasi”.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang telah peneliti kemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman, mengenai Strategi Humas Kabupaten Boyolali Mendorong Kebijakan Boyolali Pro Investasi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Boyolali.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kepemerintahan Kabupaten Boyolali, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat dalam rangka

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Boyolali melalui kebijakan Boyolali Pro Investasi, sehingga Humas dapat menentukan strategi-strategi yang lebih praktis dalam menggapai masyarakat Kabupaten Boyolali melalui kebijakan-kebijakan baru yang akan datang.

- b. Bagi Akademis. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan serta pemikiran yang dapat memberikan sumbangsih ilmu dibidang Ilmu Komunikasi khususnya dibidang Publik Relation atau Hubungan Masyarakat dalam menentukan Strategi Organisasi.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hubungan Masyarakat

1.1 Definisi Humas

Hubungan masyarakat sendiri menurut Linggar Anggoro (2005:1) dalam buku Teori dan Profesi Kehumasan mengatakan bahwa humas merupakan terjemahan dari istilah *public relation* atau PR. Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.

Sedangkan menurut *Institute of Public Relation (November, 1987)* dalam Komarudin (2014:34), Humas (Hubungan Masyarakat) adalah semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya. Humas merupakan keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam

rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti melihat bahwa seorang humas merupakan sebuah fungsi manajemen komunikasi yang berasal dari suatu organisasi baik perusahaan maupun pemerintahan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan mengenai hal-hal dalam perusahaan yang berkaitan dengan masyarakat.

Selain itu, menurut Soemirat dan Elvinaro (2004:112) menjelaskan mengenai humas atau PR sebagai salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama.

Humas sebagai cerminanan dari pemerintahan berkewajiban untuk mempertahankan citra yang telah melekat dalam pemerintahan tersebut. Dalam tugasnya humas melakukan penyebaran informasi baik dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi.

1.2 Strategi Humas

Stephen Robbins (1990) dalam *Morissan* (2008:152) menjelaskan bahwa Strategi adalah penentuan tujuan jangka panjang perusahaan dan serta memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Berfikir strategis meliputi tindakan memperkirakan atau membangun tujuan masa depan yang diinginkan, menentukan ketentuan-ketentuan yang akan membantu atau yang akan

menghalangi tercapainya tujuan, serta merumuskan rencana untuk mencapai keadaan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Widjaja strategi pokok humas diarahkan untuk meningkatkan mekanisme komunikasi dua arah antara lembaga dengan sasaran humas agar hasil-hasil yang dicapai oleh lembaga dapat di kenal oleh sasaran humas sehingga sasaran humas akan ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan lembaga khususnya dan tujuan pembangunan nasional umumnya. (Widjaja, 2002:59).

Menentukan strategi yang benar-benar matang menjadi hal terpenting dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Strategi yang baik akan menentukan hasil yang akan didapatkan nantinya. Dalam menentukan strategi harus terdapat hubungan yang erat atas seluruh tujuan program yang sudah ditetapkan, khalayak yang ingin dituju dan juga strategi yang dipilih. Hal terpenting adalah strategi dipilih untuk mencapai suatu hasil tertentu sebagaimana dinyatakan dalam tujuan atau sasaran yang di tetapkan. Proses perencanaan dan penetapan program humas mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup tugas yang hendak dilaksanakan
- b. Menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan dimana praktisi humas harus mencurahkan waktu, tenaga, dan keahlian yang dimiliki
- c. Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektifitas (*indicator of effectiveness*) dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Menentukan faktor-

faktor terukur yang akan mempengaruhi tujuan atau sasaran yang akan ditetapkan

- d. Memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai
- e. Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Programming, menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
 - 2) Penjadwalan (*scheduling*), menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran
 - 3) Anggaran (*budgeting*), menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
 - 4) Pertanggungjawaban, menetapkan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum
 - 5) Menguji dan merevisi rencana sementara (*tentative plan*) sebelum rencana tersebut dilaksanakan
 - 6) Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi
 - 7) Komunikasi, menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai pemahaman serta komitmen pada enam langkah sebelumnya

- f. Pelaksanaan, memastikan persetujuan diantara semua pihak yang terlibat mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang sudah ditentukan, pendekatan apa yang paling baik, siapa saja yang perlu dilibatkan, dan langkah atau tindakan apa yang harus segera dilakukan. (Morissan, 2008:153-154).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, sejalan dengan strategi yang dilakukan Humas Kabupaten Boyolali yang secara intens melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakatnya melalui rapat RT/RW untuk memberikan pengertian-pengertian mengenai kebijakan Boyolali Pro Investasi agar masyarakat Boyolali dapat mengerti dan turut berpartisipasi dan menjaga atas jalannya kebijakan Boyolali Pro Investasi.

Dengan melakukan kegiatan komunikasi dua arah tersebut, diharapkan humas mendapatkan *feedback* yang didapatkan langsung oleh masyarakatnya. Dengan begitu, humas dapat mengetahui mengenai keadaan yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Boyolali.

1.3 Strategi Humas dalam Boyolali Pro Investasi

Humas Kabupaten Boyolali mendukung jalannya kebijakan Boyolali Pro Investasi dengan melakukan beberapa strategi sebagai berikut; (1) Melakukan penyebaran informasi melalui media massa lokal maupun nasional seperti Televisi, Radio, media cetak, melakukan Jumpa Pers, serta Press Release. Dengan melakukan penyebaran informasi dalam skala nasional diharapkan dapat menjangkau para investor dengan lebih luas lagi untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Boyolali. Dengan datanya para

investor masuk ke Kabupaten Boyolali membuktikan bahwa strategi-strategi yang dilakukan Humas dan Protokol Kepemrintahan Kabupaten Boyolali dalam menyebarkan informasi berskala nasionalpun dianggap telah berhasil.

(2) Dialog langsung dengan masyarakat Boyolali melalui rapat RT/RW, memberikan pengertian kepada masyarakatnya menjadi hal dianggap penting oleh Humas dan Protokol Kepemrintahan Kabupaten Boyolali, karena dengan memberikan pengertian kepada masyarakat Boyolali diharapkan masyarakat Boyolali akan dapat ikut berpartisipasi dalam jalannya kebijakan Boyolali Pro Investasi. Melalui dialog langsung dengan masyarakat Boyolali Pro Investasi tersebut, tak hanya pengertian masyarakat Boyolali saja yang diinginkan oleh Humas dan Protokol Kepemerintahan Kabupaten Boyolali namun juga kepercayaan dari masyarakat mengenai kegiatan atau kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

2. Humas Pemerintah

2.1 Definisi Humas Dalam Pemerintah

Di era informasi dan komunikasi saat ini, masyarakat semakin pintar dalam melihat informasi yang berkaitan dengan Kepemerintahan. Hal ini membuat makin maraknya tuntutan masyarakat yang menuntut sistem kerja pemerintah untuk lebih "*Transparancy*" kepada masyarakatnya. Saat ini, peran humas didalam institusi kepemerintahan tak dapat diremehkan lagi. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya tingkat kritisme masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Sebagai humas yang bekerja dalam pemerintahan fungsi humas adalah mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang dirancang pemerintah yang ditujukan untuk masyarakatnya. Untuk itu, disebutkan dalam skripsi Fachri (2011:23) bahwa kegiatan humas meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) membina pengertian kepada khalayak/publik terhadap kebijaksanaan pimpinan termasuk pemberian dan pelayanan informasi, (2) menyelenggarakan dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok instansi pemerintah terutama menyangkut publikasi, (3) memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat, (4) mengumpulkan data informasi yang datang dari berbagai sumber, (5) bentuk produk humas yang dihasilkan seperti majalah, bulletin, press release, poster, folder, pamphlet, selebaran,dll.

Humas Pemerintah sendiri adalah aktivitas lembaga dan/ atau individu yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.Lembaga Humas Pemerintah adalah unit organisasi dalam suatu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi.Sedangkan praktisi Humas Pemerintahan adalah individu yang pekerjaan serta jabatannya melakukan fungsi humas dan komunikasi pada lembaga pemerintahan. Komarudin (2014:12)

Setiap berdirinya suatu lembaga organisasi perusahaan maupun instansi pemerintahan tentu memiliki tujuan untuk dapat berkembang dalam mencapai tujuan organisasinya.Keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut tentunya tak hanya didapat dengan begitu saja, dalam mencapai tujuan

tersebut perlu adanya sebuah kemampuan mempuni yang mendasarinya. Dasar-dasar terwujudnya sebuah pencapaian tak hanya sebuah kemampuan saja, namun diperlukannya sebuah pengertian serta toleransi antara anggota organisasi, penerimaan oleh masyarakat terkait, dan adanya keikutsertaan publik baik dalam kegiatan intern maupun ekstern.

Dalam menjangkau masyarakatnya, humas pemerintah perlu sekali melakukan kajian-kajian untuk mengetahui perkembangan opini masyarakat mengenai kebijakan instansi yang berkaitan dengan masyarakat.

Menurut John Millet, seperti yang di kutip dalam Ruslan (2005 :297-298) yang terdapat dalam Skripsi Fachri (2011:23) *Public Realtion* dalam dinas pemerintahan melalui empat hal pokok :

- a. Mempelajari tentang keinginan dan aspirasi publik
- b. Memberi saran tentang apa yang sebaiknya keinginan publik
- c. Menjamin hubungan yang memuaskan antara publik dan pejabat pemerintah
- d. Memberikan informasi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah

Dalam Fachri juga dikatakana bahwa humas pemerintah meliputi kegiatan mempelajari hasrat, kehendak, dan aspirasi publik, kegiatan memberi nasehat tentang apa yang sebaiknya dikehendaki oleh publik mengusahan hubungan yang memuaskan diantara publik dan petugas pemerintah. Fachri juga menjelaskan bahwa humas dapat efektif apabila humas dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pejabat humas mempunyai informasi yang lengkap mengenai organisasi

- b. Pucuk pimpinan operasional harus bertanggungjawab tentang kehumasan
- c. Manajemen harus mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat humas
- d. Harus ada sistem “*account ability*” terhadap *performance* pejabat humas. Skripsi Fachri (2011:23)

Dalam menjalankan tugasnya, Humas dan Protokol Kepemerintahan Kabupaten Boyolali memiliki aturan manajemen yang dapat menunjang kinerjanya. Selain aturan manajemen tersebut Humas dan Protokol Kabupaten Boyolali memilikijaringan terpercaya yang dapat dijadikan bahan informasi mengenai suatu keadaan dimana humas harus mencarikan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Humas selalu mengkomunikasikan atas tindakan yang akan ditempuh dengan pimpinannya sebagai bentuk tanggung jawabnya.

2.2 Fungsi dan Tugas Humas pemerintah

2.2.1 Fungsi Humas Pemerintah

Fungsi Humas Pemerintah ialah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberi layanan informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk, dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan. Komarudin (2014:13)

Rachmadi (1999), menyatakan dalam bukunya Teori dan Praktek (Aplikasi Dalam Badan Usaha Swasta dan Lembaga Pemerintah) bahwa

fungsi humas pemerintah merupakan subsistem dari penerangan secara keseluruhan dan merupakan kegiatan dari organisasi suatu departemen atau lembaga non departemen yang mempunyai peranan yang cukup penting. Adapun dasar pembentukan kegiatan humas karena adanya anggapan bahwa masyarakat wajib diberitahu suatu permasalahannya, maka masyarakat akan bersikap wajar dan bijaksana. Humas pemerintah sebagai ujung tombak pemerintahan mempunyai kewajiban untuk turut serta memantapkan program-program pemerintah didalam suatu sistem itu semakin mantap.

Peneliti melihat bahwa humas pemerintahan merupakan fungsi komunikasi dua arah dari lembaga kepada publiknya dalam tujuan menyampaikan segala kegiatan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun pemerintah merupakan suatu lembaga yang memiliki kuasa didalam aturan-aturan atas kebijakan yang terdapat dalam wilayahnya.

2.2.2 Tugas Humas Pemerintah

Menurut Komarudin (2014:34) Humas adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi dalam usaha membina hubungan dengan masyarakat dan membina martabat instansi dari pandangan masyarakat dalam memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama dan dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok, tanggung jawab, dan peran. Pada intinya tugas humas pemerintah meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh informasi, meningkatkan koordinasi dalam penyebar luasan informasi tentang kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan.

Humas pemerintah merupakan suatu cerminan lembaga yang bertugas menjaga arus komunikasi baik pemerintah kepada publiknya. Tugas humas pemerintah menjadi sangat penting karena humas memiliki tanggung jawab menjaga *image* yang terdapat dalam lembaga pemerintahan. Humas juga berperan sebagai pemiliki informasi didalam lembaga yang berkewajiban menyampaikan informasi tersebut kepada khalayaknya.

Di sebutkan dalam skripsi Fachri, bahwa menurut Rachmadi (1999) humas pemerintah keluar pada umumnya adalah:

- (a) Pemberian informasi tentang kegiatan-kegiatan Departemen dan Non Departemen yang bersangkutan
- (b) Memperhatikan dan mengolah tanggapan masyarakat yang disampaikan melalui media massa
- (c) Menampung umpan balik dari masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan
- (d) Menyelenggarakan jumpa *pers*, membuat *press release*.

Peneliti melihat tugas seorang humas pemerintah haruslah memiliki hubungan dengan media. Melalui media tersebut humas menyebarluaskan informasi yang disampaikannya. Tak hanya itu saja, humas juga mengolah setiap aspirasi masyarakat yang datang melalui media. Humas melakukan kajian-kajian untuk memberikan tanggapan mengenai aspirasi masyarakat tersebut dengan pimpinannya sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada publiknya.

2.3 Tujuan Humas Pemerintah

Tujuan Humas Pemerintah adalah menciptakan SDM humas pemerintah berkualitas, komunikatif, aspirasi dan terciptanya kemitraan dengan pemangku kepentingan. Dan sasaran yang ingin di capai meliputi; (a) terbentuknya aparatur humas pemerintah yang professional dan kompeten, (b) terbentuknya opini public yang positif, (c) tersosialisasinya kebijakan dan program pemerintah, (d) tersediannya pelayanan data dan informasi publik, (e) tumbuhnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam membangun dan, (f) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Komarudin (2011:36)

Humas pemerintah memiliki tujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif antara pemerintah dengan masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut, humas melakukan tugas eksternalnya dengan memberikan informasi-informasi mengenai pemerintah kepada masyarakatnya. Selain itu, humas juga diharapkan dapat memberikan tanggapan-tanggapan positif mengenai aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada pemerintahnya. Dengan begitu, kepercayaan akan terus meningkat seiring dengan kenyamanan yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya.

3. Investasi

3.1 Definisi Investasi

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Namun, lebih jauh ekonom asal Amerika Serikat, Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld mengatakan bahwa investasi merupakan bagian *output* perusahaan-perusahaan swasta guna menghasilkan *input* di masa mendatang yang biasa di sebut dengan

investasi. Abdul Halim dalam buku Irham Fahmi yang berjudul Manajemen Investasi (2:2015)

Sedangkan investasi menurut Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 13 dalam Standar Akutansi Keuangan per 1 Oktober 2004, Investasi adalah suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti, bunga, *royalty, dividen*, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Fahmi (3:2015) Dalam bukunya Irham Fahmi menerangkan juga bahwa investasi bisa dikenal dengan sebutan penanam modal. Konsep penanam modal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk yang sering dikampanyekan oleh pemerintah dalam rangka menarik minat investor baik domestik maupun internasional. Untuk penanaman modal luar negeri biasa disebut dengan *foreign direct investmen* (FDI). Fahmi (9:2015).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti melihat investasi merupakan suatu pengharapan dari penanam modal guna mendapatkan keuntungan dari aset-aset yang telah ditanam dalam suatu perusahaan untuk kehidupan yang lebih baik. Investasi dapat dilakukan dan dalam bentuk apapun.

Kabupaten Boyolali, sejak adanya kebijakan baru yaitu Boyolali Pro Investasi pada tahun 2010 jumlah investasi yang masuk ke wilayah Boyolali terus mengalami peningkatan. Tercatat selama bulan januari-september saja Boyolali dibanjiri dengan investasi yang masuk mencapai Rp. 6,2 triliun. Hal tersebut terlihat dari data sebagai berikut:

**PERKEMBANGAN INVESTASI PMA + PMDN KABUPATEN
BOYOLALI**

No.	PERUSAHAAN PER TAHUN	PERUSAHAAN PER TAHUN		JUMLAH PERUSAHAAN KOMULATIF		INVESTASI PER TAHUN (PMA+PMDN)		INVESTASI KOMULATIF (PMA+PMDN)	
		PMA	PMDN	PMA	PMDN	US \$	Rp.	US\$	Rp.
	Sebelum 2010			4	1,089			49,104,000	686,023,524,6 50
1.	2010	1	767	5	1,856	920.000	153,452 ,340,10 0	50,024,000	839,475,864,7 50
2.	2011	1	859	6	2,715	245,000	250,265 ,940,60 8	50,269,000	1,089,741,805 ,358
3.	2012	1	1,056	7	3,771	6,500	273,254 ,000,00 0	50,275,500	1,362,995,805 ,358
4.	2013	1	938	8	4,709	0	1,198,4 64,387, 600	50,275,500	2,561,460,192 ,958
5.	2014	4	804	12	5,513	5,000,00 0	1,790,3 94,000, 000	55,275,500	4,351,854,192 ,958

6.	2015 s/d Triwulan III	1	721	13	6,234	9,000,00	1,054,1 0 96,000, 00064,2 75,500	64,275,500	5,406,050,192 ,958
----	--------------------------	---	-----	----	-------	----------	--	------------	-----------------------

Tabel. 1.2 Perkembangan Investasi PMA + PMDN Kabupaten Boyolali.

Apabila dianggap 1 US\$ = Rp. 13,000

Maka investasi PMA+PMDN sampai sekarang mencapai Rp. 6,241,631,692,958

Sejak adanya kebijakan Boyolali Pro Investasi kawasan Boyolali memang menjadi incaran para investor baik investor yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dikarenakan kebijakan Pemkab Boyolali yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi di Boyolali.

3.2 Tujuan Investasi

Menurut Fahmi (3 : 2015) untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam suatu keputusan, diperlukan ketegasan terhadap tujuan yang diharapkan. Sama halnya, dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut antara lain :

- a. Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut,
- b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (*actual profit*),
- c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham,
- d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

Kebijakan Boyolali Pro Investasi dibuat untuk mensejahterakan masyarakat Boyolali. Dengan adanya investasi yang masuk ke Boyolali, Pemkab Boyolali mengharapkan terciptanya keberlanjutan perekonomian

di Boyolali, meningkatkan pendapatan daerah dan juga dapat membuka lowongan pekerjaan yang nantinya dapat mengurangi tingkat pengangguran penduduk Boyolali dan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan investasi, menarik para investor asing untuk menanam modal di Indonesia, hal tersebut turut andil juga dalam pembangunan bangsa melalui penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran penduduk Indonesia beserta hasil dari pendapatan pajak yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan bangsa.

3.3 Investasi dalam Boyolali Pro Investasi

Dari awal terbentuknya kebijakan Boyolali Pro Investasi pada tahun 2010, Boyolali terus dibanjiri oleh para penanam modal yang ingin berinvestasi di wilayah Boyolali. Investasi yang masuk tersebut berupa investasi saham. Penanam modal mendirikan perusahaan yang dapat menarik SDM daerah Boyolali untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut. Beberapa wilayah yang disebutkan berikut ini mewakili beberapa kecamatan di Boyolali. Berikut ini mewakili kecamatan-kecamatan Kabupaten Boyolali yang telah ditanami investasi. Beberapa diantaranya adalah (1) Kecamatan Sambi dalam dua tahun terakhir sudah berdiri beberapa pabrik diantaranya pabrik garment, pabrik plastik, pabrik semen. (2) Kecamatan Banyudono sudah berdiri pabrik semen, pabrik sosis, pabrik makanan. (3) Kecamatan Klego terdapat pabrik garment.

F. METODE PENELITIAN

1. Tempat Dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor Terpadu Humas dan Protokol Setda Kabupaten Boyolali, yang terletak di Jl. Merbabu, No. 48, Kec. Boyolali, Jawa Tengah. Sedangkan untuk waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai bulan maret 2016

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kriyantono (2006:69) penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai data atau fakta yang diperoleh.

Penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh seorang Humas Kabupaten Boyolali dalam mendorong jalannya kebijakan baru kota boyolali yaitu Boyolali Pro Investasi. Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif.

Sugiyono (2008:15) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasa digunakan oleh peneliti untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek penelitian, dari hasil pengisian wawancara, dan observasi. (Kriyantono, 2006:42)

b. Data Sekunder

Merupakan data yang sudah jadi berupa publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. (Kriyantono, 2006:42)

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengetahui bagaimana upaya seorang Humas Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas serta merancang strategi-strategi yang dirancang agar dapat mendorong keberhasilan program tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan sebagai berikut :

a. Wawancara

Berger menyatakan dalam buku Kriyantono berjudul Teknik Praktis Riset Komunikasi (2006:100) bahwa wawancara adalah percakapan antara periset-seseorang yang berharap mendapatkan informasi – dan informan – seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. (Berger dalam Kriyantono, 2006:100)

Sedangkan wawancara dalam Kriyantono (2006:102) mengungkapkan bahwa suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara

langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi diantara subjek yang di riset. Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk interaksi dan percakapan (*conversation*). Kriyantono (2006:110). Dalam observasi ini, peneliti mengamati mengenai kegiatan humas Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugasnya guna mendorong jalannya kebijakan Boyolali Pro Investasi. Kegiatan tersebut berupa wawancara yang dilakukan humas kepada media guna menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan Boyolali Pro Investasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data. Metode observasi, kuesioner, atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis atau intepretasi data. Biasanya dokumentasi bisa berbentuk dokumen publik atau dokumen privat. (Kriyantono, 2006:120). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto-foto, brosur, pamflet yang berhubungan dengan kebijakan Boyolali Pro Investasi yang didapat langsung dari narasumber.

1. Teknik Sampling

Populasi merupakan keseluruhan objek atau fenomena yang digunakan untuk riset. Menurut Kriyantono (2006:153) menyebutkan, populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling yaitu mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. (Kriyantono, 2006:158)

Berdasarkan teknik *purposive sampling*, maka peneliti memilih Informan yang memiliki peran aktif didalam lembaga Pemerintah Kabupaten Boyolali. Berikut di antaranya :

- 1) Kepala Bagian Humas Kabupaten Boyolali
- 2) Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Boyolali
- 3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Boyolali

2. Validitas Data

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu Peneliti akan berusaha memberikan gambaran, memaparkan, serta mengimpretasikan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya

dengan data empiris (sumber data lainnya yang tersedia). (Kriyantono, 2006:72).

Dwidjowinoto mengungkapkan Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi Sumber yaitu, membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. (Kriyantono, 2006:72)

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman, dimana kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang di sebut “analisis”. Silalahi (2012:338)

Reduksi data, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan ahir lengkap tersusun. Jadi, dalam penelitian kualitatif, “reduksi data” tidak perlu mangartikan sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara : melalui seleksi ketat, melalui

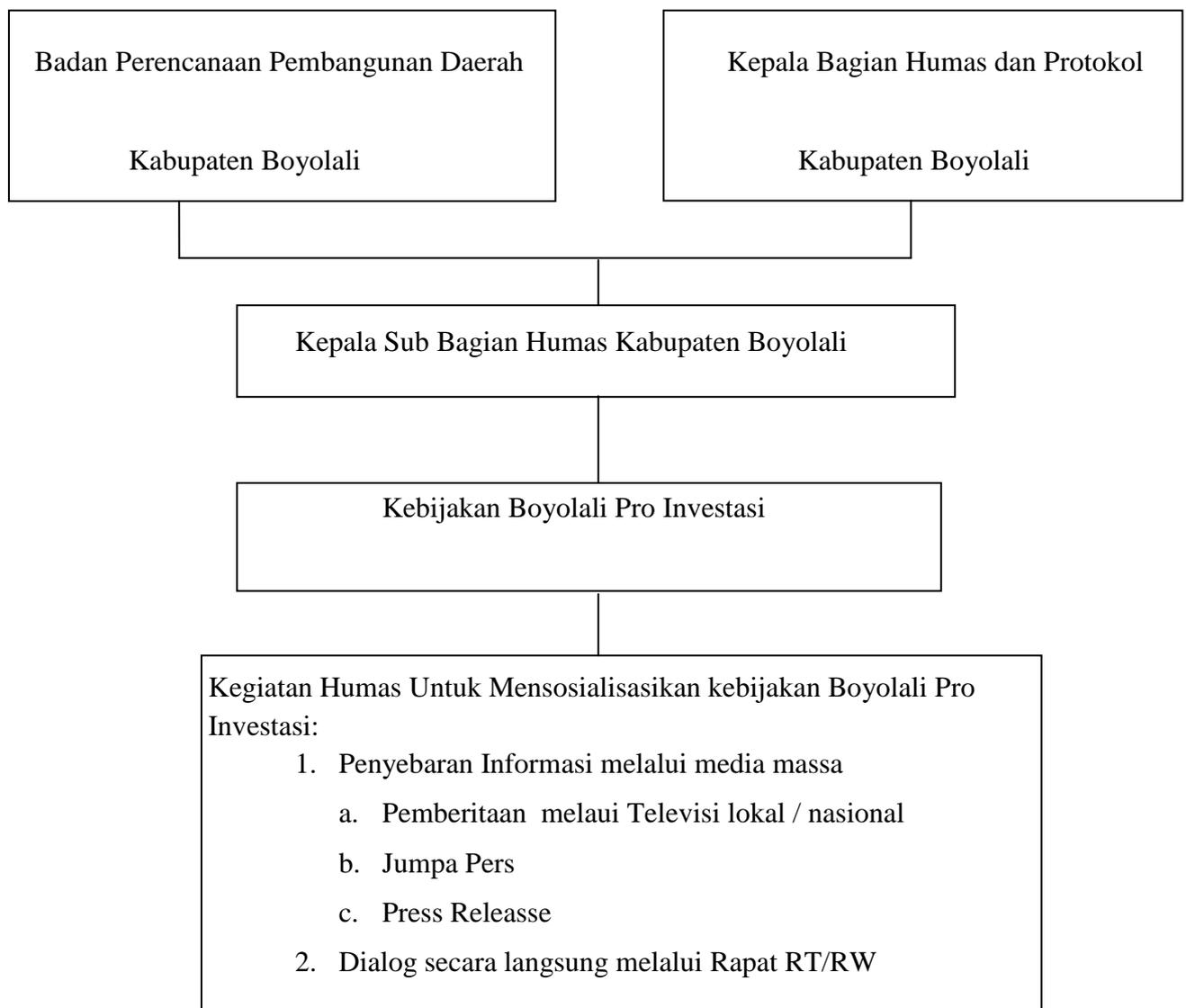
singkatan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Silalahi (2012:340)

- a. Penyajian Data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus di lakukan – lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian-penyajian tersebut.
- b. Menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran menganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dalam peninjauan kembali untuk mengembangkan “kesempatan intersubjektif”. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. (Silalahi, 2012:339-341).

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Sebagai seorang praktisi humas yang bekerja dalam lembaga instansi pemerintahan, humas Pemkab Boyolali melaksanakan tugasnya dengan berbagai manajemen organisasi yang berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Boyolali. Dalam mendorong jalannya kebijakan Boyolali Pro Investasi humas bersinergi dengan Bappeda guna menghasilkan strategi-

strategi yang dapat digunakan untuk mendorong jalannya kebijakan Boyolali Pro Investasi. Dengan strategi yang dihasilkan Bappeda bersama dengan Humas tersebut nantinya akan membuat kebijakan Boyolali Pro Investasi menarik banyak investor dan akan membuat kesejahteraan masyarakat Boyolali meningkat. Seacara sederhana kerangka pemikiran dapat di jelaskan dengan menggunakan bagan seperti berikut :



Gambar 1.3